



PROTEKSI IKM MELALUI HKI

Yogya Luncurkan Layanan Satria Harsa PDIN

YOGYA (MERAPI) - Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta meluncurkan pelayanan terbaru bagi pelaku industri yang bertajuk Satria Harsa PDIN. Satria Harsa PDIN merupakan singkatan dari Strategi Kolaborasi Pengelolaan HKI IKM Melalui Agregasi Konsultasi Fasilitas Pusat Desain Industri Nasional. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo mengatakan munculnya gagasan layanan Satria Harsa PDIN bermula dari hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku IKM di Yogyakarta masih memahami Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) hanya sebagai proteksi terhadap merek dagang. Hasil survei ini sejalan dengan hasil survei lanjutan yang dilakukan oleh tim efektif Satria Harsa PDIN pada 7-19 September 2023.

Hasil survei terhadap 469 pelaku IKM di Kota Yogyakarta menunjukkan 205 (77,4 persen) pelaku IKM mendaftarkan HKI untuk tujuan proteksi, 61 (23 persen) pelaku IKM mendaftarkan HKI sebagai syarat mengikuti program pemerintah, dan hanya 48 (18,1 persen) pelaku IKM yang mendaftarkan HKI untuk tujuan komersialisasi. "Hal ini semakin menegaskan bahwa masih banyak pelaku IKM di Kota Yogyakarta yang belum mengetahui potensi dari komersialisasi HKI," ujarnya di Balai Kota, Rabu (27/9). Berdasarkan fakta-fakta tersebut, lanjutnya, pelayanan Satria Harsa PDIN akan membantu pelaku IKM di Kota Yogyakarta semakin mengoptimalkan potensi dari HKI yang mereka miliki untuk tujuan komersialisasi. Tidak hanya itu, Satria Harsa PDIN juga mencoba menghadirkan one stop service agen-

cy melalui sebuah Intellectual Property Agency (IP Agency). IP Agency sendiri memiliki fungsi untuk mengelola HKI secara menyeluruh, mulai dari kreasi, proteksi, hingga komersialisasi. Pelayanan Satria Harsa PDIN juga sejalan dengan salah satu isu utama reformasi birokrasi tematik yang didorong

oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yaitu peningkatan investasi. Dengan adanya pengelolaan HKI yang baik dan bernilai komersial, potensi investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta un-

tuk pelaku IKM akan semakin meningkat. Pada tahap awal pelaksanaan Satria Harsa PDIN, Pemkot Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya, pemerintah setempat juga berencana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pelayanan ini, seperti dari pihak akademisi, industri, pelaku desain, maupun OPD yang lain. Secara umum, ada tiga aspek layanan yang diberikan Satria Harsa PDIN, yaitu proteksi HKI, dukungan kreasi dan inovasi desain, dan komersialisasi HKI. "Layanan Satria Harsa PDIN ini akan diluncurkan pada 28 Oktober 2023. Nantinya layanan ini dapat diakses baik secara daring, maupun secara langsung di Gedung PDIN," tandasnya. (C-12)



MERAPI-WAHYU TURI K
 Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo menjelaskan Satria Harsa PDIN.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005